

Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016

Pujawati¹, Hailuddin Bd¹, dan Eka Agustiani¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

*email korespondensi : feryanlin@yahoo.co.id

Info Artikel

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Kapasitas fiskal,
Kebutuhan fiskal,
Derajat desentralisasi,
Rasio kemandirian*

Penelitian tentang Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Timur dalam memenuhi pembangunan daerahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan perhitungan kapasitas fiskal, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan kebutuhan fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiscal Capacity Lombok Timur selama 6 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kemampuan keuangan yang semakin berkurang, artinya Lombok Timur masih belum dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh sumber keuangan. Ini semua terlihat dari rasio kemandiriannya yang termasuk dalam kategori kurang mandiri, rasio ketergantungannya masih sangat tinggi pada bantuan dana pemerintah pusat, serta kebutuhan fiskal daerah yang terus mengalami peningkatan tiap tahun. Dengan hasil analisis tersebut, pemerintah daerah mesti terus konsisten menggali sumber-sumber fiskal yang dimiliki, terutama yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi keberlangsungan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing,

maju dan sejahtera. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah pembangunan daerah disektor ekonomi yang perumusan dan pelaksanaannya tetap berpegang pada tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002: 221).

Setelah realisasi otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang

kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin di laksanakan didaerah seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan kota dan provinsi, maupun pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah (Suparmoko, 2002: 9). Oleh karena itu setiap daerah harus dapat mengembangkan potensi ekonomi daerahnya agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan mendorong kemandirian daerah agar mampu bersaing di era globalisasi (Chodariyanti, 2015: 677). Kebijakan otonomi tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah berarti pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan rumah tangganya sendiri dengan pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui potensi dan kebutuhannya.

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain menimbulkan persoalan baru, karena tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Disatu pihak, beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang mempunyai sumber-sumber penerimaan yang bersifat potensial dalam arti daerah itu sendiri mempunyai potensi-potensi yang diandalkan untuk membiayai otonomi daerah. Dilain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan yang terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya (Rosmawati dkk, 2015: 41).

Terkait hal tersebut, penguatan untuk mewujudkan otonomi daerah adalah dengan penerapan desentralisasi, terutama desentralisasi di bidang keuangan (desentralisasi fiskal). Dengan ini

pemerintah daerah akan memahami kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang dimiliki. Keduanya akan terkait dengan upaya mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan isu persaingan ekonomi antar daerah di era otonomi (Simanjuntak, 2003: 2).

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi didaerahnya agar daerah menjadi lebih mandiri yang salah satu indikasinya meningkatnya penerimaan PAD. Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi NTB memiliki penerimaan PAD relatif besar dibanding dengan 9 kabupaten/kota lainnya di NTB. Dengan jumlah PAD sebesar Rp236,18 milyar, Lombok Timur berada diposisi kedua setelah Kota Mataram. Meskipun demikian Lombok Timur masih sangat menggantungkan dana pembangunannya dari dana pusat. Tentu hal ini tidak lepas dari luas cakupan pembangunannya, seperti jumlah penduduk 1.173.781 jiwa (23,97% dari penduduk NTB) dan 216 ribu diantaranya berada dibawah garis kemiskinan (BPS Lombok Timur, 2017: 322). Selain itu luas wilayahnya mencapai 1.605,55 km². Sehingga sangat wajar Lombok Timur menerima dana perimbangan paling besar dibandingkan daerah lainnya di NTB (Rp1,78 trilyun tahun 2016).

Besarnya belanja daerah tentu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masalah pembangunan didaerah. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu harapannya kapasitas fiskal di daerah makin kuat untuk mendukungnya. Namun hal tersebut belum dapat dipenuhi dan ini tercermin dari besarnya dana perimbangan yang diterima Lombok Timur selama ini. Oleh karena itu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang sumber-sumber fiskal potensial yang bisa berkontribusi dalam penerimaan daerah sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat bisa makin berkurang untuk masa mendatang. Dengan demikian

permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal selama kurun waktu 2011-2016 di Lombok Timur akan mampu menjawab tentang kondisi fiskal yang sebenarnya.

II. KAJIAN TEORITIS

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan kewenangan daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Hal senada diungkapkan Suparmoko (2002: 18) bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Karena itu tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Terkait hal tersebut, misi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2002: 59) adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- b. menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah
- c. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian daerah, mengingat kinerja perekonomian daerah dipengaruhi oleh arah dan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya melalui penetapan kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri, dan pengaturan surplus dan defisit anggaran harus tetap memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah.

Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari

pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik supaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2002: 68).

2. Keuangan dan Pendapatan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Undang-Undang No.23/2014 dinyatakan beberapa urusan pemerintahan pusat diserahkan dan ditugaskan kepada daerah untuk membiayai penyelenggaraan, seperti:

- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah
- b. pemberian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu.
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu dalam bentuk dana perimbangan. Ini dimaksudkan agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Namun karena tidak semua sumber pembiayaan dapat diserahkan kepada daerah otonom, maka kepada daerah otonom diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka daerah otonom dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatif sendiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya (Suparmoko, 2002: 38).

Hal lain yang berkaitan dengan keuangan daerah ini adalah pendapatan daerah, yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang No.23/2014). Dengan kata lain pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Beda dengan penerimaan daerah yang merupakan semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan (Mahmudi, 2016: 134).

Beberapa sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah atau yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan komponen sebagai berikut; a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, d) Lain-Lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal (UU no.33/2004). Dana perimbangan terdiri dari; a) Dana Bagi Hasil, b) Dana Alokasi Umum, c) Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, seperti pendapatan hibah dan pendapatan darurat.

3. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah (PP Nomor 24 Tahun 2005). Belanja ini terbagi dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti; belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, seperti; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

4. Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri untuk menggali potensi yang dimiliki supaya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Hak masing-masing daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu dalam rangka menarik sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran. Sedangkan kewajiban setiap daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1). Kapasitas Fiskal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017, kapasitas fiskal daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah

tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya (Mahmudi, 2016: 134).

2). Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kemudian kebutuhan fiskal daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Untuk membiayai kebutuhan keuangan (kebutuhan fiskal) yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu daerah, disini pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk dana perimbangan.

Dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Mardiasmo, 2002: 132).

Kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Chodariyanti, 2015:680):

a. Kapasitas Fiskal, menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) guna membiayai daerahnya sendiri.

- b. Derajat Desentralisasi, dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
- c. Rasio Kemandirian, dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pamerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
- d. Rasio Ketergantungan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- e. Kebutuhan fiskal, yaitu mengukur seberapa besar kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

III. METODOLOGI

1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal dan kemampuan keuangan pada suatu daerah. Pendekatan kuantitatifnya memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang disebut sebagai variabel (Sujarweni, 2014: 11).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, dengan pertimbangan bahwa penerimaan dana perimbangan daerah ini paling besar selama tahun 2011-

2016 dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Provinsi NTB. Selain itu jumlah penduduknya yang paling besar dengan angka kemiskinannya masih besar, dan IPM yang masih rendah.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, antaranya; a) Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), b) Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan c) Data jumlah penduduk.

Beberapa variabel yang berkaitan dengan penelitian ini antaranya adalah:

- 1). Kapasitas Fiskal, yang berkaitan dengan PDRB dan jumlah penduduk.
- 2). Derajat Desentralisasi, berkaitan dengan PAD dan Total Pendapatan Daerah (TPD).
- 3). Rasio Kemandirian, berkaitan dengan PAD dan Dana perimbangan.
- 4). Rasio Ketergantungan, berkaitan dengan Pendapatan Transfer (dari pusat dan provinsi), dan TPD.
- 5). Kebutuhan Fiskal, berkaitan dengan jumlah penduduk dan Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung).

2. Analisis Data

Beberapa alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antaranya:

1. Kapasitas Fiskal

Untuk menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi nilainya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin baik. Formulasnya (Reksohadiprodjo, 2013:156) adalah;

$$FC = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)} / \sum \text{Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFs)}} \times 100$$

$$KFs = \frac{\sum \text{PDRB} / \text{Penduduk}}{\sum \text{Kecamatan}}$$

Keterangan:

FC = *Fiscal Capacity* (kapasitas fiskal)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

KFs = Kapasitas Fiskal Standar

2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2017: 140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi

No	Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pamerintah daerah makin mandiri keuangannya (Mahmudi, 2016: 140). Formula perhitungannya;

$$\text{Rasio kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan (DP)}} \times 100$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

No	Porsi PAD pada Dana Perimbangan	Tingkat Kemandirian Keu. Daerah
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Cukup
4	30,01 – 40,00	Sedang
5	40,01 – 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer (Mahmudi, 2017: 140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer (PT)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Prosentase PT terhadap TPD	Tingkat Ketergantungan
1	0,00 – 10,00	Sangat Rendah
2	10,01 – 20,00	Rendah
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Tinggi
6	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri

5. Kebutuhan fiskal

Kebutuhan fiskal yaitu mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar (Chodariyanti, 2015: 680), dengan formula (Reksohadiprodjo, 2013: 155).

$$SKF = \frac{IPP \times \left(\frac{\text{Pengeluaran Aktual per Kapita untuk jasa-jasa Publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}} \right)}{\sum \text{Kecamatan}}$$

Keterangan:

IPP = Indeks Pelayanan Publik perkapita

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan daerah

SKF = Standar Kebutuhan Fiskal

IV. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Daerah Penelitian

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 2.679,88 km², (daratan 59,91% dan lautan 40,09%). Dengan luas tersebut Lombok Timur dihuni oleh 1.173.781 jiwa dengan kepadatan rata-rata 731 jiwa/ km². (BPS Lombok Timur 2016). Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254 desa/kelurahan dengan batas administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara, Laut Jawa; Sebelah Selatan, Samudra Indonesia, Sebelah Barat, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara, dan Sebelah Timur, Selat Alas.

Perekonomian Lombok Timur masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sumber pendapatan daerah dan mata pencaharian penduduk.

2. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

A. Perkembangan Pendapatan.

Pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer yang diterima meliputi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur selama 6 tahun:

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Rupiah)

No	Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendap. yg Sah	Jumlah Pendapatan
1	2011	56.005.500.000	1.068.462.790.000	2.876.650.000	1.127.344.930.000
2	2012	88.007.660.000	1.166.884.010.000	21.175.000.000	1.276.066.660.000
3	2013	67.503.010.000	1.329.553.280.000	7.847.470.000	1.404.903.750.000
4	2014	180.308.190.000	1.505.439.310.000	8.034.030.000	1.693.781.530.000
5	2015	218.906.890.000	1.780.746.630.000	8.221.080.000	2.007.874.610.000
6	2016	236.147.470.000	1.980.711.120.000	6.948.370.000	2.223.806.970.000

Sumber: DISPENDA Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Secara total pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur enam tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti tiap tahunnya. Tahun 2011 total pendapatan Lombok Timur mencapai Rp.1.127.344.940.000,- Namun pada tahun 2016 sudah mencapai Rp.2.223.806.970.000,- atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 14,63 persen pertahun.

Peningkatan pendapatan pada tahun-tahun yang bersangkutan disebabkan oleh semakin meningkatnya pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Namun dari ketiga komponen tersebut, lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi selama 2011-2016. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah pada tahun tersebut tidak mendapatkan pendapatan dana hibah dan dana darurat.

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kontribusi yang besar untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi masih berasal dari APBN baik dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Hal ini mencerminkan Kabupaten

Lombok Timur masih sangat tergantung bantuan dana dari pemerintah pusat. Dengan keadaan tersebut maka dana yang ada sudah semestinya dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya yang lebih maju dan nyata guna meningkatkan pendapatan daerah terutama pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi PAD Lombok Timur selama 6 tahun sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi PAD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016 (Rupiah)

No	Tahun	Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	Jumlah PAD
1	2011	7.749.520.000	30.194.940.000	10.343.600.000	7.717.440.000	56.005.500.000
2	2012	12.633.960.000	25.446.200.000	9.277.340.000	40.650.160.000	88.007.660.000
3	2013	15.095.130.000	32.928.250.000	10.635.470.000	8.844.170.000	67.503.020.000
4	2014	26.037.350.000	24.999.410.000	10.984.290.000	118.287.140.000	180.308.190.000
5	2015	33.035.050.000	35.141.360.000	15.293.360.000	135.437.120.000	218.906.890.000
6	2016	48.156.910.000	32.032.650.000	19.614.770.000	136.343.140.000	236.147.470.000

Sumber: DISPENDA kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa gambaran mengenai perkembangan PAD selama enam tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2011 realisasi PAD sebesar Rp.56.005.500.000,- dan meningkat menjadi Rp.236.147.470.000,- pada tahun 2016, atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 46,074 persen pertahun, meskipun terjadi penurunan tahun 2013. Penurunan ini disebabkan penerimaan lain-lain yang sah (pendapatan hibah dan pendapatan darurat) yang relatif kecil (hanya Rp.8.844.170.000,-) namun komponen PAD yang lain tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun berikutnya secara berturut-turut meningkat lagi.

C. Perkembangan Belanja Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan diatas, selanjutnya dialokasikan dalam bentuk belanja daerah yang terbagi dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung

dan belanja langsung Lombok Timur selama masa kajian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur 2011-2016 (Rupiah)

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah
1	2011	914.349.680.000	168.795.640.000	1.083.145.320.000
2	2012	974.921.260.000	185.134.020.000	1.160.055.280.000
3	2013	1.107.249.210.000	217.813.290.000	1.325.062.500.000
4	2014	1.177.600.140.000	446.683.340.000	1.624.283.480.000
5	2015	1.189.984.450.000	469.315.930.000	1.659.300.380.000
6	2016	1.492.274.080.000	747.566.260.000	2.239.840.340.000

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan data realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa total belanja daerah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2011. Dari nilai Rp.1.083.145.320.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp.2.239.840.340.000,- tahun 2016 dengan rata-rata peningkatan sebesar 16,209 persen pertahun. Dari kedua komponen belanja daerah diatas, realisasi belanja tidak langsung lebih besar dari komponen belanja langsung. Hal ini disebabkan karena sudah umum terjadi di daerah-daerah bahwa belanja tidak langsung lebih banyak untuk kebutuhan pegawai seperti untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan keuangan dan belanja sosial.

D. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa pada suatu daerah dalam periode tertentu. Nilai PDRB ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat kondisi perekonomian pada suatu daerah. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu atas dasar harga (ADH) berlaku, dan atas dasar harga (ADH) konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ketahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi faktor

harga, maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. PDRB Kabupaten Lombok Timur (ADH Konstan 2010) Menurut Kategori.

No	Kategori	PDRB (Ribu Rupiah)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2.971.560.150	3.104.214.250	3.213.182.790	3.278.882.710	3.459.995.290	3.521.782.340
2	Pertambangan Dan Penggalian	551.200.290	591.959.530	638.681.060	673.784.040	733.283.740	801.356.340
3	Industri Pengolahan	956.549.710	1.004.285.570	1.016.283.120	1.034.399.890	1.054.444.270	1.078.932.910
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	6.117.270	6.813.620	7.125.560	9.937.340	10.375.510	11.396.340
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	7.641.360	7.753.460	8.212.680	8.626.210	8.976.240	9.556.290
6	Konstruksi	1.081.394.720	1.134.691.670	1.213.271.950	1.287.433.880	1.383.924.100	1.512.983.220
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	1.355.190.860	1.470.373.010	1.592.701.860	1.714.906.850	1.837.606.710	1.970.728.710
8	Transportasi Dan Perhubungan	421.864.430	446.521.910	470.561.980	502.182.500	527.737.180	543.311.730
9	Persediaan Akomodasi Makan Minum	79.388.580	84.082.040	90.322.830	96.278.250	102.443.590	110.082.470
10	Informasi Dan Komunikasi	180.024.330	192.659.090	208.619.560	222.155.180	239.878.100	262.838.520
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	184.420.820	208.085.750	229.544.820	247.931.050	272.208.470	305.588.690
12	Real Estate	306.823.790	325.840.510	347.882.970	366.833.400	389.789.890	421.100.000
13	Jasa Perusahaan	10.272.050	11.048.160	11.772.100	12.532.890	13.143.610	14.093.120
14	Adm. Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	662.171.640	674.278.270	707.448.920	743.802.250	771.073.510	789.577.180
15	Jasa Pendidikan	472.956.200	491.388.150	530.607.760	566.318.970	598.975.370	631.698.880
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	206.754.940	214.028.570	230.915.480	248.563.590	264.249.720	279.900.530
17	Jasa Lainnya	197.324.500	205.552.920	220.626.720	234.996.840	249.251.970	268.376.960
Total PDRB		9.649.655.610	10.173.536.470	10.734.563.170	11.249.575.840	11.917.457.170	12.535.284.220

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur 2011-2016

Dari data diatas, PDRB Kabupaten Lombok Timur ADH Konstan 2010 menurut kategori selama tahun 2011-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar Rp.9.649.655.610.000,- dan meningkat menjadi Rp.12.535.284.220.000,- tahun 2016 atau rata-rata peningkatannya sebesar 5,37 persen pertahun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terbesar. Ini mencerminkan bahwa perekonomian Lombok Timur masih didominasi sektor tersebut. Disusul kemudian oleh sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, serta sektor konstruksi. Sedangkan sektor dengan kontribusi paling kecil adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Hal ini disebabkan karena masyarakat Lombok Timur masih banyak menggunakan sumber mata air yang ada,, kemudian pengelolaan sampah yang belum maksimal.

E. Perkembangan Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk dalam hal ini termasuk salah satu variabel penelitian. Karena hal ini akan terkait dengan sumber daya pembangunan, pembiayaan pembangunan

serta nilai pendapatan perkapita daerah. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur selama 2011 sampai 2016 sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011- 2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2011	1.116.745
2	2012	1.123.488
3	2013	1.130.365
4	2014	1.153.773
5	2015	1.164.018
6	2016	1.173.781

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur 2011-2016.

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten terbanyak penduduknya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Kepadatan rata-rata penduduk Lombok Timur adalah sebesar 731 jiwa/km² (tahun 2016).

Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak berturut-turut yaitu Kecamatan Masbagik sebanyak 99.863 jiwa, Aikmel sebanyak 98.622 jiwa dan Pringgabaya 94.488 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sembalun dengan jumlah penduduk sebanyak 19.900 jiwa.

3. Analisis Data dan Interpretasi

Sesuai permasalahan diatas, untuk menjawabnya peneliti menggunakan pendekatan analisis kapasitas fiskal, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan analisis kebutuhan fiskal.

1). Analisis Kapasitas Fiskal

Analisis kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan perekonomian pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pendanaan daerah. Indikator yang digunakan yaitu PDRB, jumlah penduduk dan kapasitas fiskal standar. Semakin tinggi nilai Kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin bagus. Hasil perhitungan kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Timur 2011-2016 seperti pada tabel berikut:

Tabel 9. Kapasitas Fiskal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016

No	Tahun	PDRB (Rp)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kecamatan	Kapasitas fiskal standar (KfS)	Fiscal Capacity (FC)
1	2011	9.649.655.610.000	1.116.745	20	432.043,8	2.007,1
2	2012	10.173.536.470.000	1.123.488	20	452.765,6	2.015,5
3	2013	10.734.563.170.000	1.130.365	20	475.225,4	2.022,8
4	2014	11.249.575.840.000	1.153.773	20	487.512,5	1.999,9
5	2015	11.917.457.170.000	1.164.018	20	511.910,3	1.999,9
6	2016	12.535.284.220.000	1.173.781	20	533.970,3	1.999,9

Sumber: BPS Provinsi dan BPS Kab. Lombok Timur (Data diolah)

Dari data tabel diatas terlihat bahwa nilai Kapasitas Fiskal Standar Lombok Timur dari tahun 2011 sampai 2016 terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang semakin baik. Namun dari sisi *Fiscal Capacity*, nilainya cenderung tidak banyak perubahan (konstan) selama periode tersebut. Ini mencerminkan kemampuan keuangan Lombok Timur tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti selama masa tersebut, meskipun realisasi PDRB terus mengalami peningkatan namun dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk yang makin meningkat pula.

2. Derajat Desentralisasi

Derajat ini membandingkan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah, sehingga tercermin kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Hasil perhitungan derajat desentralisasi Lombok Timur Tahun 2011-2016 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Derajat Desentralisasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016

No	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Desentralisasi
1	2011	56.005.500.000	1.127.344.930.000	4,9	Sangat Kurang
2	2012	88.007.660.000	1.276.066.660.000	6,8	Sangat Kurang
3	2013	67.503.010.000	1.404.903.750.000	4,8	Sangat Kurang
4	2014	180.308.190.000	1.693.781.530.000	10,6	Kurang
5	2015	218.906.890.000	2.007.874.610.000	10,9	Kurang
6	2016	236.147.470.000	2.223.806.970.000	10,6	Kurang
Rata-rata				8,14	Sangat kurang

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Dengan data diatas dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Lombok Timur selama enam tahun menunjukkan nilai yang cenderung meningkat dengan rata-rata pada 8,14%, dan dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun pertama (2011-2013) tingkat kemampuan menghimpun PAD Lombok Timur termasuk dalam kategori sangat kurang karena nilai rasionya kurang dari 10%,

sedangkan selama 2014-2016 masuk katagori kurang. Dengan dasar tersebut menjadi tugas berat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur untuk berusaha keras dalam meningkatkan kemampuan menggali sumber PAD.

3. Rasio Kemandirian

Rasio ini menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nilainya diukur dari rasio PAD terhadap dana perimbangan. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Lombok Timur Tahun 2011-2016 seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Rasio Kemandirian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016

No	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Kemandirian
1	56.005.500.000	843.273.200.000	6,6	Sangat kurang
2	88.007.660.000	1.021.767.550.000	8,6	Sangat kurang
3	67.503.010.000	1.129.526.740.000	5,9	Sangat kurang
4	180.308.190.000	1.243.781.000.000	14,4	kurang
5	218.906.890.000	1.335.017.550.000	16,3	kurang
6	236.147.470.000	1.749.586.150.000	13,4	kurang
Rata-rata			10,9	kurang

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Dari rasio ini, keuangan Kabupaten Lombok Timur juga menunjukkan kondisi yang kurang mendukung. Dengan rata-rata pada 10,93%, maka tingkat kemandiriannya juga masuk katagori kurang mandiri. Ini mencerminkan realisasi PAD yang masih kecil kalau dibandingkan dengan dana perimbangan dari pusat. Untuk itu menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat supaya bisa membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakat.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio menggambarkan perbandingan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan Lombok Timur selama enam tahun seperti berikut:

Tabel 12. Rasio Ketergantungan Kabupaten Lombok Timur 2011-2016

No	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Ketergantungan
1	1.068.462.790.000	1.127.344.940.000	94,7	Sangat Tinggi
2	1.166.884.010.000	1.276.066.670.000	91,4	Sangat Tinggi
3	1.329.553.280.000	1.404.903.760.000	94,6	Sangat Tinggi
4	1.505.439.310.000	1.693.781.530.000	88,8	Sangat Tinggi
5	1.780.746.630.000	2.007.874.610.000	88,6	Sangat Tinggi
6	1.980.711.120.000	2.223.806.970.000	89,0	Sangat Tinggi
Rata-rata			91,2	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur (Data diolah).

Berdasarkan data diatas di ketahui bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Lombok Timur enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata 91,2%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 sampai 2016 termasuk dalam kategori ketergantungan yang sangat tinggi. Namun secara berlahan angka tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 angkanya 94,7% dan menjadi 89,0% di tahun 2016. Dengan kinerja pembangunan yang makin baik, maka angka tersebut dipastikan bisa terus menurun untuk masa mendatang.

5. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal menggambarkan kebutuhan pendanaan suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Kebutuhan fiskal ini diukur dengan menggunakan jumlah belanja (pengeluaran), jumlah penduduk, dan jumlah kecamatan pada suatu kabupaten/kota. Hasil perhitungan kebutuhan fiskal daerah Kabupaten Lombok Timur selama pengamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 13. Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Belanja (Rp)	Penduduk (Jiwa)	Kecamatan	SKF	IPPP
2011	1.083.145.320.000	1.116.745	20	48.495,6	2.241.500,1
2012	1.160.055.280.000	1.123.488	20	51.627,4	2.246.975,9
2013	1.325.062.500.000	1.130.365	20	58.612,2	2.260.730,0
2014	1.624.283.480.000	1.153.773	20	70.390,1	2.307.546,0
2015	1.659.300.380.000	1.164.018	20	71.274,7	2.328.036,2
2016	2.239.840.340.000	1.173.781	20	95.411,3	2.347.561,9

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan fiskal daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2011

sampai 2016 menunjukkan kebutuhan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan yang semakin meningkat karena jumlah belanja yang dikeluarkan terus bertambah dan diiringi dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan pula.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasannya dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kapasitas fiskal Lombok Timur mengalami penurunan selama masa analisis (2011-2016). Ini mencerminkan kemampuan keuangannya yang makin berkurang pula.
2. Dari aspek derajat desentralisasi juga menunjukkan katagori tingkat rata-rata sangat kurang. Hal ini menggambarkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah yang masih sangat kecil pula. Imbasnya, kemandirian keuangan Lombok Timur selama ini masuk dalam katagori rata-rata kurang mandiri, sehingga ketergantungan bantuan dana dari pemerintah pusat masih tetap tinggi. Akibat selanjutnya, rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat maupun transfer pemerintah provinsi.
3. Disisi lain kebutuhan fiskal Lombok Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut tentu karena tuntutan pembangunan yang makin besar diiringi dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan.

2. Saran

1. Menjadi sebuah tantangan yang berat bagi Pemda Lombok Timur untuk terus memenuhi kebutuhan keuangannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah menggali sumber-sumber fiskal yang dimiliki untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Potensi-potensi yang

punya prospek antaranya sektor pertanian dan kelautan, pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan sektor jasa umumnya.

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sehingga alokasinya tepat guna dan untuk mengurangi kebocoran anggaran. Perencanaan belanja (pengeluaran) juga harus diarahkan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.
3. Pemda juga perlu terus melakukan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan dan transparansi, sehingga memudahkan para investor untuk berusaha di Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Anonim. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011. *Tentang Pinjaman Daerah*.
- Anonim. 2011-2016. Kabupaten Lombok Timur dalam angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- Anonim. 2011-2016. Kabupaten Lombok Timur dalam angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Anonim. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Chodariyanti, Laily. 2015. *Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan*. Jurnal. Universitas Islam Lamongan.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2016. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonom*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Nurulliwati. 2017. *Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2015*. Skripsi. Universitas Mataram.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2013. *Ekonomi Publik*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Rosmawati, Sri dan M.Rachmad R dan Zamzami, 2016. *Analisis Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal serta Hubungannya dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo*. Jurnal. Universitas Jambi.
- Simanjuntak, Robert A. 2003. *Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Optimalisasi Potensi PAD*. Jurnal.
- Solihin, Achmad dan Niken Ajeng Lesatri, 2010. *Analisis Ketimpangan Fiskal Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah*. Jurnal.
- Sriningsih, Siti. 2013. *Analisi Ketimpangan Fiskal Pasca Otonomi Daerah*. Jurnal. Universitas Mataram.
- Sriyana, Jaka. 2009. *Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal. Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*. ALFABETA. Bandung
- Sujarweni, V.Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pubik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Widani, Krisnanda Cok istri dan Ni Made Adi Erawati, 2016. *Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada*

- Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal. Universitas Udayana.
Pembangunan-
kapasitas.blogspot.co.id/2012/08/konse
p-umum-pengembangan-
kapasitas.html?m=1. diakses pada
tanggal 08 Februari tahun 2018.
Sappilpil.blogspot.co.id/2015/12/mengukur-
kemampuan-keuangan-suatu
daerah.html?m=1. diakses pada tanggal
09 Februari tahun 2018.
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks-
Pembangunan-Manusia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks-Pembangunan-Manusia). diakses 12
Januari 2018
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebutuhan>.
diakses pada tanggal 08 Februari 2018.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/wilayah>.
diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
[http://simperdedekmak.wordpress.com/angg
aran-dd-2/](http://simperdedekmak.wordpress.com/anggaran-dd-2/). diakses 12 Januari 2018.
[http://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengerti
an-tujuan-dan-macam-macam
kebijakan-fis](http://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-macam-macam-kebijakan-fiskal.html?lokal=id) kal.html?lokal=id).
diakses 20 Maret 2018.
Wilytjeme.blogspot.co.id/2012/10/klasifika
si-belanja-daerah-2774.html?m=1.
diakses 11 Januari 2018.
[www.djpk.kmenkeu.go.id/?p=460](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460). diakses
09 Februari 2018.